

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stakeholder

Teori Stakeholder pertama kali diperkenalkan oleh (Freeman, 1984), Menurut Freeman "stakeholder dalam sebuah organisasi adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi." Dengan kata lain, stakeholder adalah setiap orang atau kelompok yang dapat memberi dampak atau menerima dampak dari pencapaian organisasi. Konsep ini menjelaskan bahwa keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya tergantung pada para pemegang saham, tetapi juga pada semua pihak yang mempunyai kepentingan di dalam perusahaan, seperti pekerja, konsumen, pemasok, pemerintah, dan masyarakat luas. Maka dari itu, perusahaan harus memperhatikan kepentingan semua pihak berkepentingan agar bisa menjaga kelangsungan dan reputasi yang baik dalam jangka panjang.

Teori stakeholder menyatakan bahwa suatu industri tidak beroperasi hanya untuk keuntungan pribadinya, tetapi juga harus memberikan dampak positif dan keuntungan bagi berbagai pihak terkait, seperti pemilik saham, investor, kreditur, penyedia, pelanggan, analis, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Dengan adanya teori ini, nilai suatu perusahaan ditentukan oleh penilaian dari pemangku kepentingan tersebut. Laporan keberlanjutan memiliki nilai tambah karena menyampaikan informasi tentang kinerja di bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kinerja lingkungan menjadi salah satu strategi perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan. (Sadipun & Mildawati, 2022)

2.1.2 Teori Legitimasi

Teori Legitimasi dikembangkan oleh Dowling, (2013), Menurut Dowling dan Pfeffer (1975), "Organizations seek to establish congruence between the social values associated with or implied by their activities and the norms of acceptable behavior in the larger social system." Pernyataan ini berarti bahwa organisasi berusaha menyelaraskan nilai-nilai sosial yang terkait atau disiratkan oleh aktivitasnya dengan norma-norma perilaku yang diterima oleh masyarakat luas. Teori legitimasi menekankan pentingnya kesesuaian antara tindakan perusahaan dengan nilai-nilai sosial masyarakat agar perusahaan mendapatkan pengakuan serta dukungan dari publik. Jika terdapat kesenjangan antara keduanya, legitimasi perusahaan dapat menurun, yang pada gilirannya dapat mengancam kelangsungan operasionalnya.

Jika perusahaan tersebut tidak melanggar nilai dan norma, masyarakat tetap mendukung perusahaan itu. Masyarakat bisa mencabut legalitas yang diberikan kapan saja jika ada faktor-faktor yang merugikan kepercayaan mereka. Salah satu cara yang bisa dilakukan perusahaan untuk mencegah hal itu adalah dengan menyusun laporan keberlanjutan. Dengan begitu, perusahaan akan mendapat respons positif dan tetap bisa beroperasi (Ananda Pravista Dewi et al., 2024).

2.1.3 Teori *Agency* (Teori Keagenan)

Salah satu teori yang dapat menjelaskan hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial dan penerapan corporate governance adalah teori keagenan (*Agency Theory*). Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976 (Jensen & Meckling, 1976). Mereka

menjelaskan bahwa hubungan keagenan terjadi saat seseorang atau pihak-pihak tertentu (*principal*) memberikan kepercayaan dan wewenang kepada pihak lain (*agent*) untuk menjalankan tugas serta membuat keputusan atas kepentingannya. Dalam lingkungan perusahaan, pemegang saham berperan sebagai *principal* yang menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada manajemen sebagai agen. Meskipun demikian, hubungan tersebut tidak selalu berjalan sesuai harapan karena manajemen dan pemegang saham bisa saja memiliki tujuan yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau yang dikenal sebagai *agency problem*. Penerapan *Corporate Governance* berdasarkan teori keagenan dapat dijelaskan melalui hubungan manajemen dan pemilik serta manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan *principal* dan sebagai imbalannya akan mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan kontrak (Pratama et al., 2023). Teori ini menekankan pentingnya adanya sistem pengawasan dan pemberian penghargaan agar manajer dapat bertindak demi kepentingan pemilik dan bisa mengurangi biaya keagenan.

Teori keagenan menunjukkan hubungan antara dua pihak. Pihak yang disebut *principal* memberikan tugas kepada pihak lain, sedangkan pihak yang disebut agen melaksanakan tugas dan mewakili kekuasaan dalam mengambil Keputusan (Serly et al., 2023). Dalam situasi ini, *principal* meminta agen untuk bertindak atas nama mereka. Namun, karena adanya kesenjangan informasi dan insentif yang tidak selalu sejalan, terjadilah konflik kepentingan.

2.1.4 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan menunjukkan seberapa baik suatu organisasi dapat mengelola dan mengawasi asetnya. Data mengenai hasil keuangan tersebut terdapat dalam dokumen keuangan, yang memainkan peran penting dalam mengevaluasi kondisi suatu Perusahaan. Pendekatan fundamental adalah cara menilai perusahaan dengan menganalisis berbagai aspek yang mencerminkan kondisi dasar perusahaan. Kinerja keuangan memainkan peran penting dalam membantu pengambilan keputusan baik dari pihak dalam maupun pihak luar perusahaan. Kinerja keuangan juga merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode, Kinerja keuangan menjadi perhatian utama manajer, dewan direksi dan pemegang saham untuk mencapai keunggulan kompetitif (Yuniarti et al., 2023)

Menurut Kurniawan & Anggrainie, (2025) Kinerja lingkungan adalah cara untuk mengevaluasi seberapa besar aktivitas, proses, atau operasi suatu organisasi memengaruhi kondisi lingkungan sekitarnya. Evaluasi ini mencakup pengukuran dan pemantauan berbagai hal, seperti jumlah emisi karbon, penggunaan sumber daya alam, dampak terhadap keanekaragaman hayati, serta kualitas udara, air, dan tanah. Selain itu, kinerja lingkungan juga melibatkan pertimbangan dampak visual dan tingkat kebisingan yang dihasilkan.

Penilaian kinerja keuangan bertujuan untuk mengevaluasi seberapa baik suatu perusahaan telah mengelola sumber daya keuangannya, terutama dalam hal tingkat keuntungan yang dicapai pada tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, evaluasi ini juga dirancang untuk menganalisis seberapa efisien perusahaan memanfaatkan seluruh sumber dayanya guna menghasilkan laba

dalam periode tertentu (Fatihah & Widiatmoko, 2022). Dalam penelitian ini, kinerja keuangan diukur melalui tingkat profitabilitas, yang diwakili oleh *Return on Assets* (ROA).

2.1.5 Sustainability Reporting

Laporan Keberlanjutan atau *Sustainability Report* adalah sebuah laporan yang dibuat oleh manajemen perusahaan dan disampaikan kepada pihak regulator. Penyampaian laporan keberlanjutan merupakan bagian dari laporan keuangan atau laporan kinerja keuangan perusahaan pada periode tertentu. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017, n.d.), laporan keberlanjutan adalah dokumen yang dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan dan menginformasikan kepada para pihak yang berkepentingan mengenai hasil yang baik di bidang Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST). Dengan menerbitkan laporan keberlanjutan, perusahaan bertujuan agar mendapatkan pengakuan dari para pihak yang berkepentingan serta masyarakat, bahwa perusahaan telah melaksanakan tugasnya dalam menjaga tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap masyarakat sekitar (Fatihah & Widiatmoko, 2022).sebagaimana dijelaskan dalam standar *Global Reporting Initiative* (GRI), pelaporan keberlanjutan menjadi sarana bagi organisasi untuk informasi mengenai dampak kegiatan oprasionalnya dibidang aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut mencerminkan berbagai konsekuensi yang timbul dari aktivitas perusahaan, baik berupa dampak positif maupun dampak yang bersifat negatif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Laporan keberlanjutan disusun dengan mengacu pada prinsip pembangunan

berkelanjutan yang bertujuan mendukung keberlangsungan organisasi di masa mendatang. (Meliza, 2025)

Pelaporan mengenai keberlanjutan di Indonesia telah didorong oleh beberapa peraturan, termasuk Pasal 66 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, yang mengharuskan perusahaan yang terdaftar di bursa untuk menyusun laporan keberlanjutan. Di samping itu, Pasal 74 dari Undang-Undang yang sama menetapkan bahwa perusahaan yang operasinya berhubungan dengan sumber daya alam harus menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program serta proyek melalui langkah-langkah yang memberikan manfaat maksimal bagi lingkungan, makhluk hidup, serta budaya dan masyarakat, sambil tetap menjaga dan meningkatkan kinerja finansial.

Tujuan membuat penjelasan mengenai isi laporan keberlanjutan adalah agar dapat menyajikan hasil kerja organisasi secara seimbang dan masuk akal. Penentuan ini perlu dilakukan dengan memperhatikan tujuan serta pengalaman organisasi, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari para pihak yang terlibat. Langkah-langkah untuk menggunakan Kerangka Pelaporan GRI adalah sebagai berikut:

1. Kenali subjek dan indikator yang relevan yang berhubungan dengan menjalani proses interaktif dengan menerapkan prinsip materialitas serta melibatkan pemangku kepentingan, memperhatikan konteks keberlanjutan, dan batasan laporan.

2. Ketika mengidentifikasi subjek, perhatikan relevansi semua aspek indikator yang tercantum dalam Pedoman GRI serta suplemen sektor yang *applicable*.
3. Ketika mengidentifikasi subjek, perhatikan relevansi semua aspek indikator yang tercantum dalam Pedoman GRI serta suplemen sektor yang *applicable*.
4. Terapkan prinsip-prinsip tersebut untuk memberikan prioritas pada subjek yang sudah dipilih dan menentukan mana yang akan mendapatkan fokus lebih.
5. Metode atau proses tertentu yang digunakan untuk mengevaluasi materialitas wajib diidentifikasi serta dibedakan oleh setiap organisasi, sesuai dengan panduan dan pengujian yang terdapat dalam prinsip pelaporan GRI.

Variabel ini diukur menggunakan sustainability GRI standards 2021 dengan total pengungkapan 117 item dalam indikator GRI standar. Laporan keberlanjutan diukur melalui Indeks Pengungkapan Laporan Keberlanjutan (SRDI). Proses penghitungan SRDI dilakukan dengan memberikan nilai 1 untuk setiap item yang diungkapkan dan 0 untuk yang tidak diungkapkan. Setelah semua item dinilai, nilai-nilai tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan total nilai bagi setiap perusahaan.

2.1.6 Tata Kelola Perusahaan

Secara umum, tata kelola perusahaan mencakup kerangka kerja dan proses yang mengawasi serta memberikan insentif yang sesuai di antara para pemangku kepentingan perusahaan, sehingga memungkinkan perusahaan mencapai tujuannya

secara efektif. Menurut Hernadianto et al., (2023), *Good Corporate Governance* adalah prinsip tatal kelola perusahaan yang sesuai, yang dibangun untuk membuat pemangku kepentingan menerima sebagai kebenaran di dalam organisasi. Pedoman Umum GCG bukanlah aturan yang mengikat, namun etika yang menjadi acuan bagi semua instansi dalam menjalankan usaha dengan baik Tata kelola Perusahaan atau *Corporate Governance* (CG) berfungsi sebagai sistem yang bertujuan memastikan bahwa kepemimpinan perusahaan mengikuti prinsip-prinsip kejelasan, tanggung jawab, transparansi, otonomi, dan keadilan. Hal ini sejalan dengan PER-01/MBU/2011 mengenai Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Badan Usaha Milik Negara. Penerapan tata kelola perusahaan yang kuat dapat meningkatkan daya saing perusahaan, memfasilitasi pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan efektif, meningkatkan nilai organisasi, serta memperkuat kepercayaan investor. (U. Anggraini & Lestari, 2022).

Prinsip tata Kelola Perusahaan (*good corporate governance*) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 adalah:

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi menandakan kesediaan untuk bersikap terbuka dalam proses pengambilan keputusan serta dalam membagikan informasi penting dan relevan mengenai organisasi.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas menunjukkan pemahaman yang jelas mengenai peran, tindakan, dan kewajiban entitas korporasi, guna memastikan organisasi dijalankan secara efisien.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban berarti bahwa tata kelola korporasi harus sesuai dengan standar hukum dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam praktik bisnis.

4. Kemandirian (*Independency*)

Kemandirian menunjukkan kondisi di mana organisasi beroperasi secara profesional, bebas dari konflik kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan serta prinsip-prinsip bisnis yang baik.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran mewujudkan konsep keadilan dan kesetaraan dalam menghormati hak-hak pemangku kepentingan yang timbul dari perjanjian hukum dan peraturan.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) adalah isu yang tidak akan pernah usai dan terus menjadi topik perbincangan bagi pelaku industri, akademisi, pembuat kebijakan, dan lainnya. Ketertarikan terhadap GCG semakin tumbuh sejalan dengan munculnya berbagai masalah skandal keuangan di sektor bisnis. Beragam pakar telah mengemukakan konsep GCG sebagai sarana untuk mengawasi dan mengendalikan kinerja manajemen (Yunina & Nisa, 2020). *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) mengartikan bahwa tata kelola perusahaan yang

baik mengacu pada struktur, sistem, dan proses yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk memastikan terciptanya nilai yang berkelanjutan dari waktu ke waktu. Hal ini dicapai dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan serta mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, menurut *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), tata kelola perusahaan yang baik berfungsi sebagai kerangka kerja bagi para pemangku kepentingan, pemegang saham, dewan direksi, dan manajemen untuk merumuskan tujuan perusahaan, menetapkan cara-cara untuk mewujudkan tujuan tersebut, serta mengevaluasi kinerja. Penjelasan ini menggambarkan esensi dari tata kelola perusahaan yang baik, yaitu jaminan terhadap akuntabilitas, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, kemandirian, dan kesesuaian dengan prinsip tata kelola yang berkualitas (Setiyawan, 2022).

Dalam penelitian ini, Tata Kelola Perusahaan yang Baik (TKP) diwakili oleh komite audit, dewan komisaris, dan dewan direksi. Ketiga elemen ini dipilih karena berfungsi sebagai instrumen internal perusahaan yang sangat penting dalam menciptakan sistem pengawasan dan pengendalian, serta menjamin efisiensi manajemen perusahaan secara keseluruhan.

Dewan Komisaris bertindak terutama sebagai badan pengawas perusahaan. Dewan ini bertugas memantau strategi manajemen yang dijalankan oleh Dewan Direksi serta memberikan arahan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan selaras dengan tujuannya, mengikuti prinsip-prinsip kehati-hatian, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris yang berfungsi dengan baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan, sehingga

mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan yang dapat berdampak negatif terhadap Perusahaan (Cahyadi & Lukman, 2023)

Dewan direksi memegang tanggung jawab penuh atas operasi sehari-hari perusahaan. Dewan ini memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan penting, menyusun kebijakan perusahaan, mengelola sumber daya, dan menjamin bahwa perusahaan mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. Dewan direksi juga memainkan peran penting dalam membentuk strategi bisnis perusahaan; oleh karena itu, kualitas dan efisiensi dewan dapat berdampak signifikan terhadap kinerja operasional dan keuangan Perusahaan. (Cahyadi & Lukman, 2023)

Selain itu, komite audit mendukung dewan komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan, terutama terkait pelaporan keuangan, pengendalian internal, proses audit, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Komite audit memegang peranan penting dalam memastikan keandalan dan integritas laporan keuangan perusahaan, sehingga investor dan pihak eksternal dapat mempercayai informasi yang disampaikan (Cahyadi & Lukman, 2023). Keberadaan komite audit yang kuat juga dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan wewenang dalam operasional perusahaan.

Penerapan ketiga metrik ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dijalankan di perusahaan milik negara (PMN). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa implementasi GCG tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan; hal ini juga

mencakup efisiensi kepemimpinan korporat dan kualitas keputusan yang diambil oleh pejabat perusahaan. Dengan dewan komisaris yang berfungsi dan terampil, dewan direksi yang kompeten, serta komite audit yang mumpuni, perusahaan diharapkan dapat mengembangkan kerangka tata kelola yang unggul, meningkatkan produktivitas operasional, memperkuat pengendalian internal, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

Semakin baik sistem pengawasan dan manajemen yang diterapkan oleh dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangannya dan mempertahankan kelangsungan usaha jangka panjangnya. Penerapan tata kelola perusahaan yang kuat juga dapat meningkatkan citra perusahaan, memperkuat kepercayaan investor, serta menciptakan nilai tambah bagi perusahaan di tengah persaingan yang semakin ketat. (Cahyadi & Lukman, 2023)

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian tentang pengaruh good corporate governance dengan proporsi yang berbeda-beda terhadap kinerja keuangan. Adapun hasil penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai bahan referensi adalah sebagai berikut dapat diajukan pada tabel 2.1

Tabel 2.1

Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

no	Peneliti	Judul penelitian	Hasil Penelitian
1	Mutia Permata Jawas, virna sulfitri	Pengaruh <i>sustainability reporting, good corporate governance</i>	Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa laporan keberlanjutan,

		dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan	kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ROA, dan ROE dapat meningkatkan nilai perusahaan.
2	Zuraida Innasya, Jacobus Widiatmoko, Maria Goreti Kentris Indarti	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Hasil Pengungkapan laporan keberlanjutan terbukti berdampak positif pada kinerja keuangan, sedangkan kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.
3	Mutiara Fatmarum Putri Satria, Lintang Kurniawati	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2020-2024	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.
4	Yesica, Tigor Sitorus, Edi Purwanto	Pengaruh tata Kelola Perusahaan yang baik dan tanggung jawab social Perusahaan terhadap kinerja keuangan (studi pada Perusahaan yang	Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil

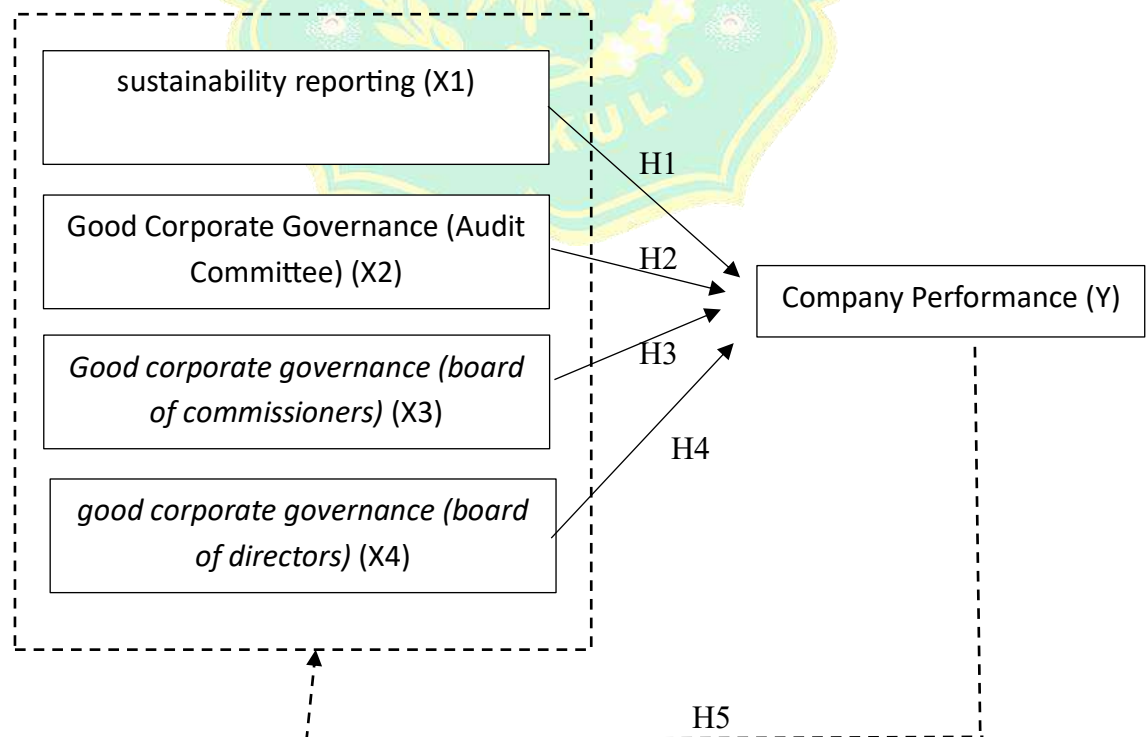
		terdaftar di indeks LQ45 tahun 2018)	penelitian menemukan bahwa GCG memiliki hubungan positif terhadap kinerja perusahaan yang diukur melalui ROA dan Tobin's Q.
5	Haryo Lukito Jati, Abubakar Arif	Pengaruh komite audit, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan Perusahaan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun, keberadaan komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan.
6	Nani Hartati	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	hasil penelitian diketahui ukuran dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan

7	Micheline Kumala, Widyasari	Pengaruh pengungkapan sustainability reporting dan good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sustainability reporting dan komite audit tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif.
8	Yudi Partama Putra, Tekad Adi Subroto	Pengaruh Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan sustainability report berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE, tetapi tidak berpengaruh terhadap Current Ratio (CR).
9	Utari Anggraini, Henny Setyo Lestari	Pengaruh tata Kelola Perusahaan terhadap kinerja Perusahaan dan Risiko Perusahaan manufaktur bursa efek Indonesia 2017-2021	Penelitian mengenai mekanisme tata kelola perusahaan menunjukkan bahwa aktivitas rapat dewan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, ukuran dewan berpengaruh terhadap risiko perusahaan, sedangkan komposisi

			dewan dan komite audit tidak memberikan pengaruh yang signifikan.
--	--	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut buku dari Sekaran & Bougie, (2022), kerangka teoritis (*theoretical framework*) menggambarkan pandangan Anda mengenai hubungan antara fenomena tertentu (atau variabel atau konsep) dan menjelaskan alasan di balik keyakinan anda terhadap hubungan-hubungan tersebut (teori). Untuk membantu proses penelitian, diagram di bawah ini menyajikan representasi visual dari masalah penelitian.



Gambar 2.1 : kerangka Pemikiran

Keterangan:

—————► : parsial

-----► : simultan

2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada variabel untuk memberikan makna yang operasional dan memungkinkan variabel tersebut dapat diukur secara empiris dalam penelitian. Definisi ini memuat konstruksi konsep ke dalam bentuk yang dapat diuji agar penelitian bersifat sistematis dan terukur.

Tabel 2.2
Table definisi operasional

no	variabel	definisi	indikator	skala
1	Sustainability reporting (X1)	Pengungkapan informasi mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap operasional yang berkelanjutan.	117 item pengungkapan Sustainability Reporting berdasarkan GRI Standards 2021 $SRDI = \frac{K}{N}$ K = jumlah item yang diungkapkan N = jumlah item yang diharapkan (Sari, 2025)	Rasio
2	Tata kelola perusahaan/GCG (komite Audit) (X2)	Sistem manajemen perusahaan yang memastikan proses bisnis berjalan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Dalam studi ini, hal tersebut dievaluasi	Σ = jumlah seluruh komite audit (Hartati, 2020)	Rasio

		melalui komite audit sebagai mekanisme pengawasan utama.		
3	Tata kelola perusahaan/GCG (dewan komisaris) (X3)	Badan korporasi yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan saran kepada dewan direksi dalam mengelola perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.	Σ = jumlah seluruh dewan komisaris (Hartati, 2020)	Rasio
4	Tata kelola perusahaan/GCG (dewan direksi) (X4)	Badan perusahaan yang sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan manajemen dan operasional perusahaan, dengan fokus pada pencapaian tujuan perusahaan secara efisien dan efektif.	Σ = jumlah seluruh dewan direksi (Satria & Kurniawati, 2025)	Rasio
5	Kinerja keuangan Perusahaan (Y)	Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari asetnya.	$ROA = \frac{Net\ income}{Total\ assets} \times 100\%$ (Pramudityo & Sofie, 2023)	Rasio

2.5 Hipotesis Penelitian

2.5.1 Pengaruh pengungkapan sustainability reporting terhadap kinerja keuangan Perusahaan

Sustainability report memiliki tujuan untuk menyampaikan mengenai kinerja perusahaan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Laporan Keberlanjutan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan kepada para pemangku kepentingan serta sebagai bukti bahwa perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku. Menurut *Global Reporting Initiative* (GRI), laporan keberlanjutan adalah dokumen yang menyampaikan pengaruh ekonomi, sosial, dan lingkungan dari suatu organisasi terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menyediakan informasi yang jelas mengenai dampak positif dan negatif yang diberikan organisasi kepada pihak-pihak berkepentingan.

Menurut Sadipun & Mildawati, (2022), untuk meningkatkan reputasi serta kepercayaan dari pemangku kepentingan, yang dapat berujung pada peningkatan pendapatan perusahaan, maka penting sekali bagi perusahaan untuk memberikan informasi tentang kegiatan lingkungan kepada pemangku kepentingan. Salah satu cara perusahaan dalam menjaga lingkungan adalah dengan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab di lokasi pendirian perusahaan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hipotesis pada penelitian ini Adalah:

H1: Pengungkapan *Sustainability Report* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perusahaan

2.5.2 Pengaruh Tata Kelola perusahaan (GCG) yang diproksikan oleh komite audit terhadap kinerja Perusahaan

Pengertian Tata Kelola Perusahaan/GCG menurut Yunina & Nisa, (2020) merupakan sebuah sistem dan pendekatan yang dipakai oleh badan perusahaan untuk meningkatkan prestasi usaha serta tanggung jawab perusahaan demi mencapai nilai bagi pemegang saham dalam periode yang panjang, sambil tetap memperhatikan kepentingan pihak terkait lainnya, berdasarkan peraturan yang ada dan prinsip-prinsip etika. Komite audit merupakan sekelompok individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memikul tanggung jawab khusus. Peran komite audit mencakup memberikan dukungan kepada dewan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, mendorong kepatuhan, serta mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam manajemen Perusahaan (Innasya et al., 2024).

Komite audit memiliki tujuan untuk mendukung dewan komisaris dalam memastikan bahwa sistem pengendalian internal berfungsi dengan baik serta pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal berjalan efektif. Jumlah komite audit yang lebih tinggi dalam suatu perusahaan akan berkorelasi dengan peningkatan kinerja keuangan perusahaan tersebut. Dengan kata lain, peningkatan kinerja yang didorong oleh komite audit dapat memperkuat kepercayaan investor terhadap perusahaan melalui mekanisme pengawasan serta penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Aprilia et al., 2022). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan hipotesis pada penelitian ini:

H2: Tata Kelola Perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan

1.5.3 Pengaruh Tata Kelola perusahaan (GCG) yang diproksikan oleh dewan komisaris terhadap kinerja Perusahaan

Dewan Komisaris bertindak sebagai wakil pemangku kepentingan (stakeholder) dengan tugas utama mengawasi jalannya aktivitas perusahaan serta memperkuat fungsi pengawasan internal. Keberadaan komisaris independen, yang berasal dari luar jajaran direksi maupun pemegang saham, berperan penting sebagai “penengah” antara kepentingan pemilik perusahaan dan manajemen. Hubungan teori agensi dengan hipotesis ini adalah seperti pembentukan dewan komisaris yang termasuk mekanisme efektif untuk menurunkan biaya keagenan. Dewan ini memastikan bahwa manajemen bertindak selaras dengan tujuan dan kepentingan pemegang saham. Dengan demikian, potensi konflik kepentingan dapat diminimalkan melalui pengawasan yang lebih ketat dan objektif (E. S. Anggraini, 2024)

Dewan komisaris yang efisien diharapkan dapat meningkatkan standar pengawasan korporasi, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan. Selain menjalankan tugas pengawasan, dewan komisaris juga memberikan arahan dan saran kepada dewan direksi terkait kebijakan strategis perusahaan.

Semakin efisien dewan komisaris menjalankan tanggung jawab pengawasan, semakin kuat pula kerangka tata kelola perusahaan tersebut. Pengawasan yang efektif dapat membantu organisasi dalam meningkatkan efektivitas operasional, memperbaiki kualitas pengambilan keputusan, dan memperkuat ketahanan perusahaan dalam menghadapi persaingan di pasar. Selain itu, dewan komisaris

sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Investor cenderung lebih percaya pada organisasi yang memiliki sistem pengawasan yang kokoh, karena sistem tersebut dianggap lebih mampu menjamin transparansi dan akuntabilitas korporasi.

Dewan direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan operasional perusahaan. Dewan direksi berperan dalam menentukan kebijakan perusahaan, menyusun strategi bisnis, serta mengelola sumber daya perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Efektivitas dewan direksi dalam menjalankan fungsi manajemen sangat memengaruhi keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan. Dewan direksi yang memiliki kemampuan manajerial yang baik akan mampu mengambil keputusan strategis yang tepat sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan.

Selain itu, dewan direksi juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan usaha perusahaan melalui pengambilan keputusan yang tepat dalam menghadapi persaingan bisnis dan perubahan kondisi ekonomi.

H3: Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

1.5.4 Pengaruh Tata Kelola perusahaan (GCG) yang diproksikan oleh dewan direksi terhadap kinerja Perusahaan

Dewan direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan operasional perusahaan. Dewan direksi berperan dalam menentukan kebijakan perusahaan, menyusun strategi bisnis, serta mengelola

sumber daya perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Efektivitas dewan direksi dalam menjalankan fungsi manajemen sangat memengaruhi keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan. Dewan direksi yang memiliki kemampuan manajerial yang baik akan mampu mengambil keputusan strategis yang tepat sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan.

Selain itu, dewan direksi juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan usaha perusahaan melalui pengambilan keputusan yang tepat dalam menghadapi persaingan bisnis dan perubahan kondisi ekonomi.

H4: Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja Perusahaan

1.5.5 Pengaruh pengungkapan *Sustainability Report*, Komite Audit, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terhadap kinerja Perusahaan

Sustainability Reporting dan mekanisme tata kelola perusahaan melalui komite audit, dewan komisaris, dan dewan direksi merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi kualitas pengelolaan perusahaan. *Sustainability Reporting* mencerminkan transparansi perusahaan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sedangkan komite audit, dewan komisaris, dan dewan direksi berperan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengelolaan perusahaan.

Penerapan *Sustainability Reporting* yang baik serta didukung oleh mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat pengendalian internal, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta menciptakan pengelolaan perusahaan yang lebih

optimal. Dengan meningkatnya kualitas tata kelola dan transparansi perusahaan, maka perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangannya secara berkelanjutan.

H5: Pengungkapan *Sustainability Report*, Komite Audit, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan Perusahaan

